

## KEISTIMEWAAN FIQH MUAMALAH/ SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI LAINYA

**Mustakim; Heru Setiawan**

Dosen Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy)  
STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dan perbedaan sistem ekonomi Sistem Kapitalis/ Kapitalisme, Sistem Komunis/ Komunisme, Sistem Sosialis/ Sosialisme, Fasisme; Sistem Ekonomi Campuran, Sistem Ekonomi Islam. Dalam tulisan ini akan diungkapkan mengenai perbandingan sistem ekonom tersebut dan akan mengungkap bahwa Sistem Ekonomi Islamlah yang menampilkan keseimbangan dan keadilan, dan itu tidak terjadi pada sistem ekonomi lainnya. dan melihat sistem ekonomi mana yang utuh yang memberikan keadilan dan sistem ekonomi mana yang memberikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan

**Keyword:** *Fiqh Muamalah, Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Lainnya.*

### **A. Definisi Fiqh Muamalah**

#### **1. Fiqh**

Fiqh Muamalah terdiri dari dua suku kata yaitu Fiqh dan Muamalah, apa itu Fiqh dan Muamalah dan Apa itu Fiqh Muamalah, berikut ini definisinya : Fiqh, Secara etimologi mempunyai arti *al-fahmu* (paham), Sedangkan secara definisi Fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah dan digali dari dalil-dalil *tafsili*”. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkai dengan kata *al-islami* sehingga terangkai *al-fiqh al Islami*, yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang luas. Selanjutnya ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fiqh mualah.<sup>1</sup>

#### **2. Muamalah**

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab, secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat), kata ini menggambarkan suatu

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.1-2

aktivitas oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup>

Dalam pengertian lain muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Dalam arti luas, muamalah adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.<sup>3</sup>

### **3. Fiqh Muamalah**

Pada mulanya memiliki cakupan yang luas, “yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Selanjutnya belakangan ini, fiqh muamalah lebih banyak difahami sebagai “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya, “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia”.<sup>4</sup>

Menurut Saedon, kegiatan ekonomi Islam tidak boleh dipisahkan daripada fiqh muamalat, malah kegiatan itu hendaklah dikawal dan dipandang oleh fiqh muamalat. Sedangkan menurut Kahf, Hubungan antara fiqh muamalat dengan ekonomi Islam adalah seumpama kajian *tatabahasa* dengan kemahiran pengguna bahasa. Suratman Kastin Hasan mengatakan bahwa iaitu *tatabahasa* lebih merupakan prinsip, manakala penggunaan bahasa merupakan penggunaan prinsip tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Ibid.* hal. 2

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.1-3

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 3

<sup>5</sup> Suratman Kastin Hasan, et.al, *Ekonomi Islam: dasa dan amalah*, (Selangor: Darul Ehsan, 2005). hal.18

Untuk menjadikan ekonomi Islam boleh berdiri dengan sendiri, maka disamping ilmu fiqh muamalat, kajian juga perlu dijalankan untuk menimba pemikiran ekonomi para ulama' Islam silam serta pengetahuan tentang perjalanan sistem ekonomi semasa. Pemahaman ketiga-tiga fenomena tersebut akan dapat menyingkap dan membuka skop yang lebih luas dari segi perkembangan konsep dan penggunaannya.<sup>6</sup>

Untuk menjadikan ekonomi Islam boleh berdiri dengan sendiri, maka disamping ilmu fiqh muamalat, kajian juga perlu dijalankan untuk menimba pemikiran ekonomi para ulama' Islam silam serta pengetahuan tentang perjalanan sistem ekonomi semasa. Pemahaman ketiga fenomena tersebut akan dapat menyingkap dan membuka skop yang lebih luas dari segi perkembangan konsep dan penggunaannya.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari definisi diatas maka Fiqh Muamalah itu tidak bisa dipisahkan dengan Ekonomi Islam, karena Fiqh Muamalah merupakan fondasi dasar Ekonomi Islam.

## **B. Ruang lingkup Fiqh muamalah**

Al-fikri yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi yaitu *al-Muamalah al-Madiyah* dan *al-Mu'amalah al-adabiyah*. Muamalah *madiyah* ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekadar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga ridha Allah. Muamalah *al-adabiyah* ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjeknya. Muamalah *Adabiyah* ini

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu, dan yang lainnya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamala bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul saling merindhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli (*al-ba'i al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dlaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*tafsil*), batas bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), peberian hak guna pakai (*al'ariyah*), barang titipan (*al-wadit'ah*), barang temua (*al-luqhathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al-'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*) dan tambah dengan beberapa masalah *mu'shirah* (*mahaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.<sup>9</sup>

### **C. Sistem Ekonomi**

Sistem ekonomi adalah kumpulan lembaga dan kerangka kerja untuk mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan ekonomi, membuat keputusan-keputusan ekonomi yang pokok yaitu; berapa banyak barang yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut dan bagaimana membagi adil hasil tersebut.<sup>10</sup> Dalam tulisan yang dimaksud dengan sistem ekonomi pada dasarnya sistem pengaturan seluruh pelaku ekonomi bersama lembaga-lembaga lain menggunakan sumber daya tersedia diatur dan dikendalikan agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat meningkat dan

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hal.4

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Ibid*, hal.5

<sup>10</sup> Sayid Syekh, *Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Referensi, 2014), hal.90-91.

mencapai kesejahteraan ekonomi bersama.<sup>11</sup> Pratama Raharja dkk, mengatakan bahwa ada beberapa aspek penting dalam suatu sistem ekonomi; komponen-komponen yang terdiri atas unit, pelaku dan intitusi, saling terkait dan saling memengaruhi secara teratur-kontinu, memiliki fungsi koordinasi.<sup>12</sup>

Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yang disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena cara manusia dalam memenuhi alat pemuas kebutuhan dan cara mendistribusikan alat kebutuhan tersebut didasari filosofi yang berbeda, maka timbullah berbagai bentuk sistem dan prakti ekonomi dari banyak negara didunia. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh filsafat agama, ideologi, dan kepentingan politik yang mendasari suatu negara penganut sistem tersebut. Selanjutnya dalam praktik ada lima sistem ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni kapitalisme, sosialisme, fasisme, komunisme, dan terakhir adalah ekonomi Islam.<sup>13</sup>

Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi latar belakang sejarah ideologi, luas dan letak geografi, tingkat pembangunan, keterbukaan, sistem politik.<sup>14</sup>

Sebelum membicarakan aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang ada dalam ekonomi, ada manfaatnya jika lebih dulu disinggung walaupun dengan serba singkat perihal ‘ideologi’ dan ‘isme’ serta ‘agama’. Pengemukaan ketiga hal ini amat penting mengingat seperti akan dikedepankan nanti, baik ideologi dan isme maupun agama, ketiganya memiliki pengaruh yang besar bagi pembentukan sebuah aliran mazhab ekonomi.<sup>15</sup>

Sesuai dengan sunnatullah, dunia selalu berubah dan sistem ekonomipun mengalami pergeseran dan bahkan pergantian. Secara garis besar, para ahli ilmu ekonomi - tidak terkecuali ahli-ahli ekonomi Islam – biasa membedakan ideologi ekonomi ke dalam tiga aliran/mazhab (*al-madzahib al-iqtishadiyyah: economic*

---

<sup>11</sup> Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Management*, (Yogyakarta: STIN YKPN, 2007), hal.33

<sup>12</sup> Pratama Rahrja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makro & Mikroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008). hal.464

<sup>13</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Economics: Eknomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Soslusi*. (Jakarta: Bumi Aksara.2009), hal.219

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: suatu pengantar*, (Yogyakarta, Ekonosia, FE UII, 2007), hal.79-82

<sup>15</sup> M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Kolam Publishing, 2008), hal.137

*ideology*) yaitu: ekonomi kapitalis (*ra'si-maliyyah, capitalistic economy*), ekonomi sosialis (*as-syuyu'iyah; socialistic economy*) dan ekonomi Islam/Syariah (*al-iqtishad al-islami; syariah economy*). Masing-masing mazhab ekonomi ini sudah tentu memiliki ciri-ciri atau karakteristik sendiri-sendiri yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Disamping ketiga aliran ekonomi di atas, sesungguhnya masih ada sistem ekonomi lainnya yang dikenal dengan sebutan *Welfare State* (Negara Kesejahteraan). Sesuai dengan namanya, Negara Kesejahteraan, *welfare state* tampak lebih banyak di bahas di dalam buku-buku ilmu hukum tata negara daripada dijadikan pembahasan lebar panjang di dalam buku-buku ekonomi.<sup>16</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, Sayid Syekh menuliskan ada lima sistem ekonomi yaitu kapitalis, komunis, sosialis, mixed sistem, dan sistem ekonomi Islam.<sup>17</sup>

Sistem-sistem ekonomi yang ada didunia ini dapat diklasifikasikan (dikelompokkan) berdasarkan beberapa cara. *Pertama*, dilihat dari mekanisme koordinasinya. Berdasarkan hal ini, sistem-sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sistem tradisi (*tradition economy*), sistem komando (*command economy*), dan sistem pasar (*market economy*), *Kedua*, berdasarkan penekananan hak kepemilikan yang diberlakukan. Berdasarkan hal ini, sistem ekonomi dibedakan menjadi sosialis (*socialist economy*) dan sistem kapitalis (*capitalist economy*). Tetapi ada juga sistem ekonomi yang tidak dapat diklafikasikan berdasarkan kedua cara di atas. Sistem ekonomi ini disebut sistem campuran (*mixed economy*).<sup>18</sup>

Dalam sejarah ilmu ekonomi, paling sedikit dikenal sepuluh mazhab atau sistem ekonomi besar dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing atau malahan semuanya dianggap gagal terutama diukur dari asas keadilan dan pemertaan. Kesepuluh mazhab ekonomi yang dimaksudkan ialah: merkantilisme, klasik dan neo klasik, kapitalis, sosialis, komunis, ekonomi berencana di dunia

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal.142-143.

<sup>17</sup> Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonoi dan Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Referensi, 2013), hal.25

<sup>18</sup> Pratama Rahrja, *Op.Cit*, hal.466

ketiga, monetary orde, orde strukturalis, ekonomi campuran, *post industrial state economi*. Selain dari kesepuluh aliran ekonomi tersebut yang paling tertua adalah merkantilisme. Tetapi menurut Edmund Curry, feodalisme sesungguhnya telah mendahului merkantilisme.<sup>19</sup>

Klasifikasi sistem ekonomi; Sistem tradisi (*tradition economy*); sistem comando (*command economy*); sistem ekonomi pasar (*market economy*); sistem kapital (*capitalist economy*) (kapitalis awal/ *early capitalism*), (kapitalis modern/ *advanced capitalism*), (insituti dalam ekonomi kapitalis, hak kepemilikan, keuntungan, konsumerisme, kompetisi, harga), (kekuatan dan keterbatasan ekonomi kapitalis); sistem sosialis (*socialist economy*) (sosialisme marxisme), (sosialisme komunisme); sistem campuran.<sup>20</sup>

Dewasa ini sistem ekonomi yang paling dominan didalam dunia modern adalah kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme adalah filsafat ekonomi yang dominan di dunia baru yang terutama sekali mencakup Eropa Barat dan Amerika Utara dibawah kepemimpinan Amerika Serikat. Sosialisme adalah ideologi ekonomi yang pernah dominan di Uni Soviet, RRC, dan beberapa negara di Eropa Timur. Walaupun sosialisme telah mengalami kemunduran hebat dengan kehancuran pemimpinnya, yakni Uni Soviet, ia masih memiliki relevansi yang besar untuk disebut sebagai sebuah filsafat ekonomi.<sup>21</sup>

Melakukan perbandingan sistem ekonomi bersifat subjektif karena tidak mungkin mengkaji sistem ekonomi secara logis yang dapat diterima oleh semua orang. Para pembanding akan terpengaruh kedudukan dan sikap nilai yang melekat pada dirinya, sehingga objektivitasnya terganggu. Apalagi kerangka sebagai cara pandang organisasi sosial berbeda antara anarkisme, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, dan Islam. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mencapai kesimpulan shahih yang objektif.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> M. Amin Suma, *Op.Cit*, hal.141-142.

<sup>20</sup> Pratama Rahrja, *Op.Cit*, hal.476

<sup>21</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sitem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. (Jakarta: Kencana, 2012), hal.355

<sup>22</sup> Siah Khos'iyah, *Fiqh Muamalat Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal.256

Sementara itu, Muslich menuliskan bahwa menurut pengalaman empirik sejumlah negara untuk mengorganisir seluruh pelaku ekonomi dalam menentukan pilihan penggunaan sumber daya (*resources*) ditemukan empat sistem perekonomian yang pernah dan sedang berlaku sampai saat ini sebagai berikut: sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar bebas, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam.<sup>23</sup>

#### **E. Sistem Kapitalis/ Kapitalisme,**

Beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat berkembang dimana terdapat kemerdekaan, toleransi, inisiatif orang perorang maupun ketidaksamaan pendapat atau fikiran.<sup>24</sup> Sistem ekonomi kapitalisme didasarkan pada prinsip bahwa yang berkuasa adalah kapital. Tujuan, motif, dan prinsipnya didominasi oleh tiga gagasan: perolehan, persaingan, dan rasionalitas. Individu menjadi sentra untuk menguasai kapital dalam persaingan bebas.<sup>25</sup>

Sistem Kapitalis/ Kapitalisme menganut sistem ekonomi pasar bebas

##### **1. Sistem Ekonomi Pasar Bebas**

Sistem ekonomi pasar bebas adalah sistem ekonomi yang mengatur mekanisme kerja ketiga pelaku ekonomi tersebut sepenuhnya ditangan masyarakat, yaitu kelompok pengusaha dan kelompok konsumen. Kedua kelompok ini membentuk kekuatan pasar. Kedua kelompok ini (pembeli dan penjual) diseluruh pasar dan masyarakat secara alami menentukan sendiri-sendiri tentang apa, bagaimana dan untuk siapa barang produk atau jasa dicipta atau dibuat dan diperjual-belian.

Karakteristik sistem ekonomi pasar liberal (bebas) seperti nampak apada berikut ini :

- a. Bebas memiliki harta (kapital, tenaga dan alat-alat produksi lain).
  - 1). Bebas membeli, menjual, menggunakan untuk diorientasikan pada kepentingan individu pemilik.

---

<sup>23</sup> Muslich, *Loc.Cit.*

<sup>24</sup> Sayid Syekh. *Op.Cit.* hal.91

<sup>25</sup> Siah Khos'iyah, *Loc.Cit.*

- 2). Bebas menikmati hak atau harta tersebut sesuai dengan tujuan pribadi.
- 3). Bebas melakukan pekerjaan sesuai dengan potensi individu (pribadi).
- b. Bebas bertindak ekonomi, bersaing.
  - 1). Bebas untuk berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mencapai tujuan kepuasan pribadi atau individu.
  - 2). Negara tak boleh campur tangan dalam mengatur mekanisme antar pelaku ekonomi
  - 3). Modal merupakan ukuran atau unsur utama dalam berprestasi.

Dalam karakteristik sistem ekonomi liberal ini terdapat sejumlah kebaikan didalamnya antara lain:

- a. Ada semangat berprestasi atau produktif bagi individu.
- b. Persaingan menimbulkan kreativitas tinggi bagi para pelaku ekonomi.

Namun ada sejumlah kelemahan dalam sistem pasar liberal ini:

- a. Persaingan bebas menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi di antara pemilik faktor produksi
- b. Nilai moral (persaudaraan, kerjasama, saling membantu, kasih sayang) tidak lagi diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi individu.
- c. Keharmonisan di antara pelaku ekonomi tidak ada, atau kurang menonjol.
- d. Hak majikan atau *leadersi* dengan hak pekerja terlampau mencolok. *Gap* terlalu besar.
- e. Konflik kepentingan di antara sesama pekerja dan pelaku bisnis/ekonomi sangat tajam.<sup>26</sup>

Sistem ekonomi Kapitalis: kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, ketimpangan ekonomi,<sup>27</sup> Kecenderungan dan kebaikan sistem ekonomi kapitalis; kebebasan, meningkatkan produksi, profit motif.<sup>28</sup> Kecenderungan kelemahan sistem ekonomi kapitalis;

---

<sup>26</sup> Muslich, *Op.Cit.* hal.35-36

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, hal.91-94

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.94-96

tidak merata, tidak selaras, maksimasi profit, krisis moral, materialistis, mengesampingkan kesejahteraan.<sup>29</sup>

#### **F. Sistem Komunis/ Komunisme,**

Pada sistem ini yang pintar maupun tidak pintar perlakuannya relatif sama, dengan demikian timbulnya akibat yaitu kurangnya motivasi pendidikan masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas.<sup>30</sup> Sistem ekonomi komunis diperkenalkan oleh Karl Marx, sehingga sering disebut Markisme. Komunisme memandang bahwa kehidupan adalah sama dan tidak ada suatu perbedaan. Untuk itu, komunitas hendaknya mengarah pada sistem tersebut, dan negara sebagai perwakilan komunitas harus menguasai segala aspek kehidupan ekonomi. Ekonomi harus direncanakan dan dikuasai secara total oleh negara.<sup>31</sup>

Prinsip ekonomi markisme merupakan titik permulaan timbulnya sosialisme, sehingga memiliki ciri yang hampir sama. Perbedaan terletak pada paham nasionalisme. Sosialisme memegang teguh pada prinsip nasionalisme, sedangkan komunisme memegang prinsip persamaan dalam kehidupan masyarakat tanpa batas wilayah, batas negara hanya sementara yang akan hilang jika tujuan persamaan dan pemerataan tercapai.<sup>32</sup>

#### **G. Sistem Sosialis/ Sosialisme,**

Pada sistem ini demokrasi tetap dipertahankan, seperti motif-motif perorangan, persaingan dibiarkan berkembang, peran pemerintah tetap dominan.<sup>33</sup> Sosialisme adalah kebijakan atau teori yang bertujuan memperoleh distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi pusat.<sup>34</sup>

Sistem ekonomi sosialisme; pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, disiplin politik. Kecenderungan kebaikan sistem ekonomi sosialis;

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.96-98\

<sup>30</sup> Sayid Syekh. *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Siah Khos'iyah, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Sayid Syekh. *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Siah Khos'iyah, *Loc. Cit.*

disediakkannya kebutuhan pokok, didasarkan perencanaan negara, produksi dikelola oleh negara. Kecenderungan kelemahan; sulit melakukan transaksi, membatasi kebebasan, mengabaikan pendidikan moral.<sup>35</sup>

Sosialisem menganut sistem ekonomi terpusat sebagaimana berikut ini. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah atau pihak ketiga disamping kedua kelompok pelaku ekonomi diatas sanagat dominan dalam menentukan dan mempengaruhi berjalannya aktivitas ekonomi.

Ciri sistem ekonomi terpusat ;

- 1) Kepemilikan harta dikendalikan oleh negara
- 2) Individu tak punya atau sedikit hak kepemilikan.
- 3) Kemanfaatan harta ditentukan oleh negara. Dalam arti negara mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi barang atau harta.
- 4) Kebersamaan sosial dan ekonomi diatur oleh negara.
- 5) Unsur manusia merupakan bagian sosial. Kebersamaan sosial dalam produksi dan ekonomi.

Kebaikan sistem ekonomi terpusat ;

- 1) Kebutuhan pokok rakyat dijamin negara.
- 2) Pekerjaan diperoleh dan diatur negara.
- 3) Perencanaan ditentukan terpusat oleh negara. Kelebihan dan kekurangan barang diatur oleh negara sampai seimbang.
- 4) Semua kegiatan produksi dan distribusi diatur oleh negara.

Kelemahan sistem ekonomi terpusat

- 1) Daya saing (*bargaining*) antar pelaku ekonomi tak terjadi.
- 2) Sifat kepemilikan diri sendiri tak terjadi.
- 3) Proses kreativitas masyarakat tak terjadi.
- 4) Kegairahan berprestasi tak kondusif.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, hal.98-104

<sup>36</sup> Muslich, *Op.Cit.* hal.33-35

## **H. Sistem Ekonomi Campuran**

Mixed Sistem, adalah suatu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem dimana baik pemerintah maupun pasar secara keseluruhan bersama-sama mempunyai peran dalam mempengaruhi dan menentukan kelima masalah ekonomi. Jadi, kegiatan bisnis disini merupakan bagian integral dari keluruhan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, salah satu pelaku pasti terikat dan terkait satu dengan para pelaku yang lainnya dalam sistem perekonomian.

Namun dalam praktiknya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh banyak pihak antara lain; penyelenggara negara kurang konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengendali dan pemicu atau perangsang perekonomian, terjadinya penyimpangan penyelenggara negara, pihak pemerintah lebih memihak pada para pemilik kapital yang kuat daripada masyarakat kebanyakan.

## **I. Fasisme**

Fasisme muncul dari filsafat radikal yang muncul dari revolusi industri yakni sindikalisme. Eksponen sindikalisme adalah George Sorel (1847-1922). Para penganjur sindikalisme menginginkan reorganisasi masyarakat menjadi asosiasi-asosiasi yang mencakup seluruh industri atau sindikat-sindikat pekerja. Mereka menganjurkan agar ada sindikat-sindikat pabrik baja yang dimiliki dan dioperasikan oleh para pekerja di dalam industri batu bara, begitu pula halnya pada industri-industri lain. Dengan demikian, sindikat-sindikat yang ada pada dasarnya merupakan serikat-serikat buruh, akan menggantikan negara. Dalam sistem ekonomi fasisme, pemerintah melakukan pengendalian dalam bidang produksi, sedangkan kekayaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam praktiknya, fasisme dan komunisme adalah dua gejala dari penyakit yang sama. Keduanya sering dikelompokkan sebagai totaliter. Keduanya sama dalam hal pemerintahan, yaitu kediktoran satu partai.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Op.Cit*, hal.224

## **J. Sistem Ekonomi Islam**

### **1. Ekonomi Islam**

Pengertian ekonomi Islam menurut para ahli ekonomi islam. Perdebatan mengenai ilmu ekonomi Islam bersifat positif atau normatif ?

Menurut Chapra, ekonomi Islam jangan terjebak oleh dikotomi pendekatan positif dan normatif. Karena sesungguhnya pendekatan itu saling melengkapi dan bukan saling menafikan. Sedangkan Manan mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi positif dan normatif. Jika kecenderungan beberapa ekonom yang sangat memetingkan positivisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau sebaliknya, tentu sangat di sayangkan.<sup>38</sup>

Veithzal Rivai, dkk.,. Menjelaskan sistem ekonomi Islam baik secara filosofis dan hakikat, sebagaimana tulisan berikut ini. Secara filosofis sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun diatas nilai-nilai Islam, dimana prinsip-prinsip tauhid yang mengedepankan nilai *ilahiyyah* menjadi ‘inti’ dari sistem ini. Prinsip utama berjalannya sistem ekonomi Islam pada tataran operasional adalah prinsip keadilan (*al-’adl*). Islam adalah adil dan adil itu adalah Islam. Sistem ekonomi Islam juga menjamin keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi.<sup>39</sup>

Pada beberapa dekade belakangan ini, tampillah ekonomi Islam sebagai salah satu alternatif sistem ekonomi baru. Ekonomi Islam menawarkan wacana ekonomi berdasarkan kepada kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia dengan tetap memperhatikan hakikat penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah Allah dipermukaan bumi ini.<sup>40</sup>

### **2. Sistem Ekonomi Islam**

Sistem Ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk menglokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai

---

<sup>38</sup> Mardani, *Op.Cit*, hal.17

<sup>39</sup> *Ibid.* hal.212-213

<sup>40</sup> Sayid Syekh, *Op.Cit*, hal.24

kemenangan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadits.<sup>41</sup>

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai falah (kemenangan) berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>42</sup>

a. Ciri dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Nazaruddin Umar dalam Sutan Remi Syahdeni mengatakan bahwa didalam sistem perekonomian Islam aspek-aspek manusia dan kemanusiaan betul-betul mendapatkan perhatian. Keseluruhan ajaran Islam bermuara pada kemaslahatan manusia dan kemanusiaan, yaitu tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, menghapuskan kesengsaraan, kerugian pada manusia, bahkan seluruh cipta-Nya.<sup>43</sup>

Karakteristik Ekonomi Islam; Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta; Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral; Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan; Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum;<sup>7</sup> Kebebasan individu dijamin dalam Islam; Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian; Bimbingan konsumsi; Petunjuk investasi; Zakat; Larangan riba;<sup>44</sup>

Sistem ekonomi syariah dengan derivasi sistemnya menjanjikan bentuk perekonomian yang jujur, transparan, egaliter, dan demokratis. Nilai keadilan dan keseimbangan menjadi dasar dari perilaku ekonomi Islam. Keterbukaan dari sistem ini membuat kehidupan perekonomian jujur, nonmonopoli, dan jaminan atas hak-hak konsumen.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Sayid Syekh. *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.xii.

<sup>44</sup> Mardani, *Op.Cit*, hal.17-29

<sup>45</sup> Siah Khos'iyah, *Op.Cit.* hal.259.

Kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidasmamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat<sup>46</sup>

Prinsip ekonomi Islam : Kepemilikan ganda: khusus dan umum (*al-milkiyyah al-muzdawijah: al-khassah wa al-'amamah*), Kebebasan ekonomi terikat (*al-hurriyah al-iqtisadiyyah al-muqayyadah*), dan jaminan sosial (*al-takaful al-ijtima'i*).<sup>47</sup>

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam; kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidak samaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>48</sup>

b. Konsep, Pandangan dan Hakikat

Konsep kemashlahatan dalam islam tersimpul pada lima hal yang disebut dengan lima prinsip utama (*dharruriyatul khamsah*), yaitu; kemaslahatan agama (*al-adin*), kemaslahatan jiwa (*al-nafs*), kemaslahatan akal (*al-aql*), kemaslahatan keluarga dan keturunan (*al-nasl*), dan kemashlahatan harta benda (*al-mal*). Kelima prinsip ini sangat universal, dan prinsip ini juga sejalan dengan berbagai agama dan hak asasi manusia secara universal.<sup>49</sup>

Seseorang boleh saja, bahkan bebas melakukan kreasi yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi tetapi dalam batas-batas tertentu, yang bersangkutan tetap diminta untuk diperhatikan kaidah-kaidah moral. Manakala hal ini dilanggar, maka profit yang diperoleh tidak lagi masuk dalam kategori halal dan baik (*halalan thayyibah*), tetapi boleh masuk kategori haram atau syubhat yang berada setingkat diatas haram.<sup>50</sup>

Ekonomi Islam menurut Sutan Takdir Alisyahbana dalam Ahmad Syukri, Islam bukanlah suatu agama yang menentang kekayaan pribadi, seperti

---

<sup>46</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Op.Cit*, hal.238-239

<sup>47</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah: didunia Islam kontemporer*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hal.25

<sup>48</sup> Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hal.104-112

<sup>49</sup> *Ibid*. hal. xii-xiii.

<sup>50</sup> *Ibid*. hal. xiii

dikehendaki segolongan kaum komunis atau sosialis. Islam melindungi kekayaan pribadi itu diwarisi oleh keturunan atau keluarga seseorang. Selanjutnya jelas juga, bahwa Islam bukanlah agama yang mengajurkan pengikut-pengikutnya menjauhi kekayaan duni, yang menganggap bahwa kekayaan dunia itu hanya menghalangi usaha melepaskan diri dari tipuan maya dunia. Malah dapat dikatakan, bahwa Quran dengan terus terang menganjurkan umat Islam menjalankan keaktifan didalam dunia.<sup>51</sup>

Islam telah mengizinkan pemeluknya mempercantik diri dengan memakai perhiasan dan bersenang-senang menikmati apa yang diinginkannya, dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak lepas dari kesederhanaan dan niat yang baik dan tidak melampaui batas syara' serta ria. Kemudian Allah menyebut perbagai macam kesenangan dan aneka ragam barang hiasan yang merupakan sebagian dari karuniaNya kepada manusia, dengan tujuan agar manusia selalu mengingatNya dan selalu bersyukur dan berterimakasih kepada-Nya.<sup>52</sup>

c. Persoalan etika

Etika ekonomi semata tanpa dihubungkan dengan nilai Islam tidak mampu menyelesaikan kehidupan manusia atau menjadi etika utama dalam kehidupan manusia karena dia harus menyawab untuk apa hasil ekonomi? Dapatkan dia menjadi arti kepada seluruh hidup kita?.<sup>53</sup>

Norma etika dalam bermuamalah; bertitik tolak dari paham ketuhanan, sistem ekonomi berlandaskan etika, sistem ekonomi bercirikan kemanusiaan, asas tatanan ekonomi Islam: pertengahan dan keseimbangan yang adil<sup>54</sup>

## **K. Analisis Perbandingan**

Perbandingan ekonomi syariah dengan kapitalisme dan marxisme secara singkat.

---

<sup>51</sup> Ahmad Syukri, *Dialog Islam dan Barat; Aktualisasi Pemikiran Etika Sutan Takdir Alisyahbana*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal.147.

<sup>52</sup> *Ibid.* hal. 149

<sup>53</sup> *Ibid.* hal. 153

<sup>54</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hal.44-51

Aspek Perbandingan	Konsep Syariah	Konsep Kapital	Konsep Marxis
Filsafat ekonomi	Berasal konsep tauhid yang menguatkan Tuhan sebagai puncak dari segala hukum kausalitas	Berasal <i>laissez faire</i> yang memberikan kebebasan penuh dalam memenuhi kebutuhan materialistiknya	Berasas pada konsep perjuangan kelas yang menegaskan peran Tuhan sebagai kausa prima kehidupan
Nilai dasar ekonomi	Kebebasan terhadap kepemilikan ( <i>ownership</i> ) harta kekayaan dan sumber-sumber ekonomi, nilai-nilai keseimbangan ( <i>equilibrium</i> ) nilai keadilan ( <i>justice</i> )	Hak milik individu adalah absolut adanya kebebasan memasuki semua sektor kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas dan norma individu ditarik dari individualisme dan utilitarianisme.	Hak milik ada pada kaum proletar yang diwakili oleh pemerintah diktator, sentralistik, dan mematikan kreativitas ekonomi rakyat, pendapat dan distribusi kolektif adalah hal utama dan hubungan ekonomi di luar negara sangat dibatasi
Nilai instrumen ekonomi	Konsep zakat, larangan riba (bunga), kerjasama ekonomi ( <i>ctooperasion</i> atau <i>syirkah</i> ), jaminan sosial, peran negara (lembaga pengawasan atau <i>hisbah</i> )	Terletak pada persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk tanpa retribusi, pasar yang monopolistik, informasi dan bentuk pasar otomistis dari tiap unit ekonomi.	Perencanaan sentralistik melalui proses iterasi yang mekanistik, pemilik kaum proletar terhadap faktor produksi secara kolektif.

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam sendiri secara garis besar dapat kita jelaskan sebagai berikut. Kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi

kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>55</sup>

Ciri-ciri utama sistem ekonomi kapitalis, sosialis, welfare state, Islam/Syari'ah menurut Muhammad Amin Suma :<sup>56</sup>

Kapitalis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai ekonomi berasal dari individu;</li> <li>2. Individualisme;</li> <li>3. Kemajuan material (keuntungan keuangan) belaka;</li> <li>4. Kebebasan politik;</li> <li>5. Sebatas duniawi;</li> <li>6. Semata-mata upah</li> </ol>
Sosialis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai ekonomi bersumberkan negara</li> <li>2. Kolektivisme</li> <li>3. Kemajuan material</li> <li>4. Politik serba negara</li> <li>5. Sebatas duniawi</li> <li>6. Semata-mata upah</li> </ol>
Welfare State	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai ekonomi bersumberkan negara</li> <li>2. Individu dan sosial</li> <li>3. Kemajuan material</li> <li>4. Stabilitas politik</li> <li>5. Sebatas duniawi</li> <li>6. Semata-mata upah</li> </ol>
Islam/Syari'ah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai ekonomi bersumberkan wahyu ilahi (Qur'an – Hadis)</li> <li>2. Kesatuan (<i>al-i'tihad, unity</i>)</li> <li>3. Keseimbangan (<i>al-tawazun/ al-i'tizan, equilibrium</i>)</li> <li>4. Kebebasan/ kemerdekaan (<i>al-hurriyah, free will</i>)</li> <li>5. Tanggung Jawab (<i>al-ta'lif, responsibility</i>)</li> <li>6. Keuntungan duniawi dan ukhrawi</li> <li>7. Mendambakan pahala (<i>ajrun</i>) di samping upah (<i>ujrah</i>).</li> </ol>

#### **L. Perbedaan dan Persamaan**

Dalam menyikapi perbedaan dan persamaan M. Amin Suma, mengungkapkan bahwa; berkenaan dengan hal motif ekonomi, misalnya, jelas ada persamaan antara ekonomi ini sama-sama bekerja dengan motif ekonomi alias mencari keuntungan (*profit oriented*) atau tepatnya kepuasan. Demikian juga

---

<sup>55</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Op.Cit*, hal.239

<sup>56</sup> M. Amin Suma, *Op.Cit*, hal.156

tentang objek yang menjadi kajian, ruang-lingkup pembahasan dan kelengkapan teori-teori ekonomi lainnya. Dibalik itu semua, jelas terdapat perbedaan yang cukup signifikan dan bahkan mendasar antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam.<sup>57</sup>

Perbandingan konsep ekonomi Islam dan Kapitalisme seperti; hak milik, kebebasan ekonomi, monopoli, bunga, eksploitasi, distribusi kekayaan.<sup>58</sup>

Perbandingan konsep ekonomi Islam dan Sosialisme seperti; pemilikan, materialisme, regimentasi dan totalitarianisme, kesamaan ekonomi.<sup>59</sup>

Muhammad Amin Suma, menuliskan pendapat Syafruddin Prawiranegara, mengenai persamaan dan perbedaan sistem ekonomi sebagai berikut; Perbedaan, yang berbeda adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi oleh ekonomi. Keperluan itu berbeda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dari orang yang satu ke orang yang lain. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan alam, seperti iklim, susunan tanah, keadaan air dan lain-lain sebagainya; maupun faktor-faktor yang berlainan dalam masyarakat, seperti adat kebiasaan, agama dan lain-lain. Perbedaan antara keperluan-keperluan itu menyebabkan adanya perbedaan pula dalam pelaksanaan prinsip ekonomi.<sup>60</sup> Sementara itu perbedaan sistem ekonomi menurut Muhammad amin Suma sendiri ialah terutama, terletak pada masing-masing sistem hukum yang mengatur dan masing-masing nilai etika yang menuntunya, perbedaan itu sendiri muncul terutama disebabkan ketidak samaan sistem akidah keagamaan yang diyakini dan pandangan hidup (ideologi) yang dipedomani antara kaum muslimin disatu pihak dengan umat-umat manusia non Muslim di pihak lain. Perbedaan yang demikian sesungguhnya tidak hanya terdapat pada pada bidang ekonomi, akan tetapi juga adalah bidang-bidang kehidupan yang lain seperti hukm, pendidikan dan lain sebagainya.

Hal-hal yang membedakan ekonomi Islam secara operasional dengan ekonomi sosial maupun kapitalis, yang dikutip Mardani dari Marthon: Dialektika

---

<sup>57</sup> M. Amin Suma, *Op.Cit*, hal.150

<sup>58</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Op.Cit*, hal.356-361.

<sup>59</sup> *Ibid*. hal.362-367.

<sup>60</sup> Syafruddin Prawiranegara dalam Muhammad Amin, *Op.Cit*. hal.158-159.

nilai-nilai spiritualisme dan materialisme; Kebebasan berekonomi; Dualisme kepemilikan; Menjaga kemaslahatan individu dan bersama.<sup>61</sup>

Muhammad Amin Suma mengatakan bahwa dalam kenyataan sekarang ini hampir tidak ada lagi aliran/ mazhab ekonomi yang dianutnya persis dengan diteorikan oleh ahli ekonomi di atas. Terutama ketika dihubungkan antara teori ekonomi yang diperkenalkan oleh ilmu pengetahuan (ekonomi normatif) dengan praktek yang dipersembahkan oleh para pelaku ekonomi di pasar (ekonomi terapan). Bahkan harus diakui secara jujur dan transparan bahwa antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam/Syari'ah pun dalam banyak hal terdapat persamaan di balik berbagai perbedaan yang ada seperti yang segera akan dibahas setelah ini.<sup>62</sup>

### **KESIMPULAN**

Sistem Kapitalis/ Kapitalisme, melahirkan individualisme dan hilangnya tanggung jawab sosial. Sistem Komunis/ Komunisme, Sistem Sosialis/ Sosialisme, Fasisme; ketiga sistem ekonomi justru sebaliknya yakni hilangnya individualisme dan munculnya semangat sosialisme tetapi beriringan dengan hilangnya semangat bekerja/bersaing, dan munculnya kontrol pemerintah serta justru dalam faktanya terjadi kapitalisme oleh swasta/sebagian golongan pengusaha/pemerintah. Sistem Ekonomi Campuran, sistem sistem ekonomi tanpa utuh tapi faktanya justru sistem ekonomi campuran, justru lebih berpihak kepada pasar dalam perekonomiannya dan hilangnya tanggung jawab pemerintah.

Sistem Ekonomi Islam, adalah sistem ekonomi yang utuh tidak berat kepada individu dan tidak pula berat kepada pemerintah/ sosial, individu punya untuk berkretifitas tetapi pula di punya tanggung jawab sosial. Pemerintah tetap melihat pasar sebagai daur ekonomi yang alami, tetapi disisi lain tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya juga penuh dan tidak terabaikan sebagaimana terjadi dalam ekonomi kapitalis dan sosialis.

---

<sup>61</sup> Mardani, *Op.Cit*, hal.30-31.

<sup>62</sup> Muhammad Amin Suma, *Op.Cit*, hal.157.

Dari perbandingan diatas jelaslah terlihat bahwa Sistem Ekonomi Islamlah yang menampilkan keseimbangan dan keadilan, dan itu tidak terjadi pada sistem ekonomi lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Syukri, *Dialog Islam dan Barat; Aktualisasi Pemikiran Etika Sutan Takdir Alisyahbana*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal.147.
- Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah: didunia Islam kontemporer*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hal.25
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.1-3
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: suatu pengantar*, (Yogyakarta, Ekonosia, FE UII, 2007), hal.79-82
- M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Kolam Publishing, 2008), hal.137
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.17
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sitem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. (Jakarta: Kencana, 2012), hal.355
- Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Management*, (Yogyakarta: STIN YKPN, 2007), hal.33
- Pratama Rahrja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makro & Mikroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008). hal.464
- Sayid Syekh, *Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Referensi, 2014), hal.90-91.
- , *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonoi dan Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Referensi, 2013), hal.25
- Siah Khos'iyah, *Fiqh Muamalat Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal.256
- Suratahman Kastin Hasan, et.al, *Ekonomi Islam: dasa dan amalah*, (Selangor: Darul Ehsan, 2005). hal.18
- Sutan Remi Syahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.xii.
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Economics: Eknomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Soslusi*. (Jakarta: Bumi Aksara.2009), hal.219